

**EFEKTIVITAS PROGRAM SISWA PINTAR WARGA SUKOWATI  
(SINTAWATI) DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013-2014**

**Adita Damarika**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Di Indonesia masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan seperti krisis ekonomi yang berdampak pada anak putus sekolah. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang rendah. Salah satu usaha dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Sragen, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen membuat sebuah kebijakan pendidikan gratis yang dinamakan dengan program Sintawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sintawati dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sragen tahun 2013-2014. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklarifikasi dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Sintawati belum efektif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan karena ada beberapa indikator yang belum tercapai. Program Sintawati saat ini juga belum sepenuhnya dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas karena masih banyaknya angka anak putus sekolah dan mengulang. Banyaknya jumlah pemohon beasiswa tidak sebanding dengan banyaknya jumlah lulusan. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya sosialisasi sehingga informasi yang diakses juga minim.

*Kata Kunci: Program Sintawati, Beasiswa Pendidikan, Kebijakan Pendidikan*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks demikian pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang

sangat luas; yang meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Nanang, 2013). Awalnya pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat saja, tetapi dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menandai bahwa daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk melakukan otonomi daerah. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam upaya pengelolaan pendidikan. Dilihat lebih dekat, sebenarnya di Indonesia ini masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan. Sejak dihantam krisis ekonomi di tahun 1998, kondisi perekonomian kita sebenarnya bisa dikatakan belum pulih benar. Hal tersebut sejalan dengan persoalan dunia perbankan yang banyak menguras tenaga, pikiran, dan kekayaan negara untuk menyehatkannya sehingga mengurangi anggaran untuk menambah pembangunan di bidang-bidang lain, terutama pendidikan. kondisi-kondisi tersebut jelas ikut menghambat perkembangan dan kemajuan pendidikan nasional (Muhammad Rifai, 2011).

Salah satu dampak krisis ekonomi yang secara langsung dirasakan dalam pendidikan adalah menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar biaya pendidikan. hal ini berakibat pada meningkatnya angka putus sekolah, bolos di kalangan siswa, dan menurunnya motivasi belajar siswa yang berada di sekolah. Biaya merupakan faktor penting dalam pendidikan. Namun memenuhi hajat hidup dalam hal ini kebutuhan pokok lebih penting. Hal ini yang menyebabkan banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Banyak sekali anak usia sekolah yang harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Oleh karena itu undang-undang mengamanatkan agar pemerintah memperhatikan anak-anak usia sekolah agar dapat mengikuti pendidikan dasar tanpa dibebani biaya yang dapat

menghambat proses pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2.

Di setiap daerah yang sekarang ini sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah menjadi semakin terbuka luas untuk berkesempatan melakukan pembangunan di semua aspek termasuk aspek pendidikan. Dalam bidang pendidikan, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan di daerah melalui pemberdayaan kemampuan lokal, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pendidikan, terjaminnya pemerataan pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan semakin meningkatnya mutu pendidikan (Jalal dan Supriadi, 2001).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga berupaya memperbaiki pendidikan dengan cara membuat kebijakan sekolah bebas biaya untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan tersebut dibuat dalam bentuk program yang bernama Sintawati. Sintawati merupakan kepanjangan dari Siswa Pintar Warga Sukowati. Program tersebut diprioritaskan untuk siswa yang bersekolah di Kabupaten Sragen jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK negeri maupun swasta. Tujuan program tersebut yaitu agar anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk bersekolah dapat meminimalisir angka putus sekolah.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Siswa Pintar Warga Sukowati (Sintawati) dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sragen tahun 2013-2014?”

## KERANGKA TEORI

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005).

Efektivitas berfokus pada *outcomes* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Konsep efektivitas menurut Chester I. Barnard Gibson dkk, adalah pencapaian sasaran yang disepakati atas usaha bersama dan tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan efektivitasnya (Gibson, 1991). Menurut H. Emerson efektivitas diartikan sebagai pengukuran tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sasaran dan tujuannya sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka dapat dikatakan sudah efektif, namun jika yang terjadi sebaliknya yaitu sasaran dan tujuan yang tercapai

tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka itu tidak efektif (Sutiyono).

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnely dalam bukunya *Prilaku Struktur, Proses* menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi sebagai berikut:

- a. Produksi, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu *output* sesuai dengan permintaan lingkungan.
- b. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara *output* dengan *input*.
- c. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

## **2. Program**

Program merupakan unsur pertama yang harus ada untuk merangkai atau melaksanakan adanya suatu kegiatan untuk melaksanakan atau menjalankan pekerjaan tertentu diperlukan penyusunan program agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat terarah sehingga dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

### **3. Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu (H.A.R Tilaar, 2008). Kebijakan pendidikan menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini pendidikan). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan efektif, diperlukan sejumlah hal berikut (Rusdiana, 2015):

- a. Perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui pendidikan yang telah diputuskan.
- b. Jelasnya struktur pelaksana dan pembiayaan.
- c. Kontrol pendidikan, yaitu mekanisme yang memungkinkan pendidikan mengetahui kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

### **4. Kualitas Pendidikan**

Menurut Syarifuddin ada banyak hal yang menjadi indikator kualitas atau mutu pendidikan, yaitu nilai ujian (hasil belajar), tingkat kelulusan, tingkat *drop out*, lama kelulusan studi, dan tingkat pengangguran. Selain itu juga ada dua faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal berupa: kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah, dan kepemimpinan. Kemudian faktor eksternal meliputi: partisipasi

masyarakat, ekonomi, sosial budaya, serta sains dan teknologi (Syarifuddin, 2002).

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, menuntut adanya perubahan sikap maupun tingkah laku dari seluruh komponen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, anak didik, dan tenaga administrasi termasuk orang tua siswa dan masyarakat dalam membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sistem informasi yang presentatif guna untuk mencapai keberhasilan serta untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat. Jadi, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Beasiswa Sintawati**

Dalam tahapan pelaksanaan kebijakan daerah, program beasiswa Sintawati (Siswa Pintar Warga Sukowati) yang sudah mulai dilaksanakan dari tahun 2012 harus melewati beberapa tahapan sampai pada siswa mendapatkan beasiswa tersebut. Tidak semua siswa berhak mendapatkan beasiswa ini karena program daerah ini juga memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sampai pada program beasiswa Sintawati berjalan. Program ini dikhususkan untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini diberlakukan untuk tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain untuk siswa sekolah dasar, program beasiswa Sintawati juga diberlakukan untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Pulau Jawa.

Program ini berhak diperoleh bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Sragen. Untuk mendapatkan beasiswa ini setelah mendaftarkan diri lalu dilanjutkan survey yang dilakukan oleh UPT-PK (Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Sragen. Jika siswa yang sudah masuk database dari keluarga tidak mampu maka siswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Begitu juga dengan beasiswa untuk mahasiswa dari PTN di Pulau Jawa, jika syarat dan hasil survey memenuhi maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa tersebut dengan catatan harus berprestasi dengan menunjukkan hasil Indeks Prestasi (IP) yang baik. Jika mengalami penurunan mahasiswa tersebut akan mendapatkan sanksi yaitu berupa potongan uang beasiswa sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 tahun 2015. Bagi penerima beasiswa Sintawati ini juga wajib lulus tepat waktu, jika tidak maka akan ada pencabutan beasiswa.

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Program Beasiswa Sintawati**

Dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan haruslah mempunyai prosedur yang jelas, begitu juga dengan pengimplementasian kebijakan program beasiswa Sintawati ini perlu adanya kegiatan yang tersusun dengan rapi dan baik sesuai dengan standart prosedur yang sudah ditentukan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang efektif berdasarkan dengan indikator yang ada di dalamnya. Indikator efektivitas



dalam pelaksanaan program beasiswa Sintawati, pembahasan mengacu pada indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson yang terdiri dari indikator Produktivitas, Efisiensi, Kepuasan, Keunggulan, dan Pengembangan.

Program beasiswa Sintawati ini merupakan program baru dengan tujuan untuk membantu siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sehingga nantinya mereka mampu bersaing ke dunia kerja dengan harapan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, program Sintawati yang merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan lewat jalur pendidikan juga bertujuan untuk mengurangi PPAPKH (Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan).

Terkait dalam pelaksanaan program beasiswa Sintawati di Kabupaten Sragen pencetakan kartu dan survey lapangan dilaksanakan oleh UPT-PK karena dalam kegiatan ini UPT-PK mempunyai kewenangan untuk mencetak kartu Sintawati. Berdasarkan hasil pendataan dan data pencetakan kartu Sintawati yang diperoleh oleh peneliti, jumlah kartu yang sudah dicetak oleh UPT-PK dari tahun 2012 sampai pada bulan Mei 2016 sejumlah 82.070 untuk kartu Sintawati Melati, 5.036 untuk kartu Sintawati Menur, dan 721 untuk Kartu Sintawati Kenanga.

Dibawah ini adalah rekapan jumlah pemohon beasiswa PTN Sintawati tahun 2012-2015:

**Tabel 1.1**  
**Rekap Pemohon Beasiswa PTN Sintawati**

<b>Tahun</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Jumlah Pemohon</b>	46	148	83	163

*Sumber: UTPK Kabupaten Sragen*

**Tabel 1.2**  
**Rekap Penerima Beasiswa PTN Sintawati**

<b>Tahun</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Jumlah Pemohon</b>	31	36	33	46

*Sumber: UTPK Kabupaten Sragen*

Tetapi jika dilihat dari banyaknya jumlah pemohon beasiswa sintawati Perguruan Tinggi Negeri dari tahun 2012-2015 masih tergolong dalam jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya lulusan SMA/MA/SMK di Kabupaten Sragen yang mencapai angka 11.173 siswa pada tahun ajaran 2014-2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi dan informasi tentang beasiswa Sintawati untuk Perguruan Tinggi Negeri.

### **C. Kualitas Pendidikan**

Kualitas pendidikan dalam pelaksanaan program beasiswa Sintawati untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dilihat dari faktor internan dan faktor eksternal. Faktor internal dilihat dari pembiayaan sekolah. Dalam hal ini siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dalam hal pembiayaan sudah terbantu dengan adanya program Sintawati. Untuk siswa SD, SMP, dan SMA dalam hal pembiayaan bagi yang mempunyai kartu

Sintawati sudah tidak perlu membayar uang SPP, uang pembangunan, maupun uang ekstrakurikuler seperti yang sudah tertera di dalam kartu Sintawati. Sedangkan untuk mahasiswa dalam hal pembiayaan tidak dilihat dari besarnya uang atau biaya kuliah per semester di masing-masing universitas. Tetapi untuk mahasiswa peserta beasiswa Sintawati Perguruan Tinggi Negeri dalam hal pembiayaan diberikan Rp 6.000.000,00 per semester dengan rincian Rp 3.000.000 untuk uang biaya pendidikan dan sisanya sebesar Rp 3.000.000 untuk biaya hidup (*living cost*) selama enam bulan.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka akan berdampak baik terhadap mahasiswa peserta beasiswa Sintawati. Pengaruh Indeks Prestasi terhadap besarnya biaya pendidikan yang akan diterima oleh peserta juga dapat memicu semangat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Karena dengan seperti itu maka mereka dapat menunjukkan kemampuan atau prestasi bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kebijakan tersebut juga dapat mempengaruhi lama studi mahasiswa. Dengan mendapatkan Indeks Prestasi (IP) dengan nilai yang baik maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan mata kuliah wajib yang harus ditempuh, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan kelulusan. Dari hasil data yang ada lapangan, mahasiswa peserta penerima beasiswa Sintawati rata-rata menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Bahkan yang standarnya untuk jenjang S1 menyelesaikan studi selama 4 tahun, peserta penerima beasiswa sudah ada yang lulus kuliah dengan waktu 3,5 tahun.

Kualitas pendidikan juga dilihat dari angka *drop out* siswa pendidikan dasar dan mahasiswa. Angka *drop out* yang terjadi dalam hal khususnya

karena pembiayaan pendidikan jarang terjadi kecuali anak yang bersangkutan bermasalah di sekolah. Dalam hal pembiayaan pendidikan tidak menjadi kendala anak tidak dapat melanjutkan sekolah dikarenakan program bantuan pendidikan yang lebih dikenal dengan Beasiswa Sintawati menjadi salah satu solusi untuk masalah pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu sehingga dapat menekan angka *drop out*.

Kualitas pendidikan dilihat juga dari angka putus sekolah dan yang saat ini terjadi ternyata masih ada angka siswa mengulang setiap tingkatan sekolah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK). Selama tahun 2013-2014 masih ada angka anak putus sekolah masih ada di tingkatan SD/MI dan SMP/MTS. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada pengurangan angka anak putus sekolah terutama pada satuan pendidikan SMA/MA/SMK. Hal tersebut dalam tabel data dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Tabel Angka Siswa Mengulang, Putus Sekolah, dan Lulusan tahun 2012/2013-2013/3014**

	<b>Satuan Pendidikan</b>			
	<b>SD/MI</b>	<b>SMP/MTS</b>	<b>SMA/MA</b>	<b>SMK</b>
<b>Mangulang</b>	1700	26	32	10
<b>Putus Sekolah</b>	128	27	120	170
<b>Lulusan</b>	15.055	13.231	10.877	

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen*

**Tabel 1.4**  
**Tabel Angka Siswa Mengulang, Putus Sekolah, dan Lulusan tahun**  
**2013/2014-2014/2015**

	Satuan Pendidikan			
	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK
<b>Mengulang</b>	781 siswa	59 siswa	13 siswa	9 siswa
<b>Putus Sekolah</b>	26 siswa	24 siswa	-	-
<b>Lulusan</b>	14.090	14.019	11.173	

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen*

#### **D. Analisis Hubungan dengan RKPD Bidang Pendidikan**

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sragen, indikator mutu atau kualitas pendidikan sangat diperlukan untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh kualitas pendidikan yang sudah tercapai khususnya di Kabupaten Sragen. Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator yaitu:<sup>1</sup>

##### 1. Mutu Masukan

Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa 94,37% siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenisnya.

##### 2. Mutu Proses

Indikator mutu proses dapat dilihat dari angka mengulang, putus sekolah, dan angka lulusan. Angka mengulang terbesar tahun pendidikan 2013/2014 terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 1700 siswa dan terendah yaitu pada tingkat SMK yaitu 10 siswa. Selanjutnya

<sup>1</sup> Buku Profile Dnas Pendidikan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2014

angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SMK yaitu 170 siswa dan angka putus sekolah terendah terdapat pada tingkat SMP/MTS yaitu 26 siswa. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses pendidikan ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SMP/MTS. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah.

### 3. Mutu SDM

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka presentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SMA/MA yaitu 95,43% dan guru layak mengajar terendah adalah pada tingkat SD/MI. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah hal itu terlihat dari kesesuaian ijazah guru dengan bidang studi yang diajarkan.

### 4. Mutu Fasilitas

Mutu fasilitas atau sarana prasarana pendidikan dilihat dari ruang kelas dengan kondisi yang baik. Ruang kelas dalam keadaan baik akan dapat menunjang semangat belajar dan proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Selain ruang kelas, indikator mutu fasilitas lainnya adalah fasilitas sekolah yang ada seperti perpustakaan, lapangan olahraga, ruang UKS, toilet, ruang laboratorium, ruang praktik, dan lain sebagainya.

### 5. Biaya

Indikator biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga berperan dalam hal mutu biaya yaitu salah satunya adalah

dengan adanya program Sintawati untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga miskin.

#### **E. Sintawati Pendidikan Dasar, Lanjutan, dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)**

Program Sintawati digolongkan menjadi 3 yaitu Sintawati Pendidikan Dasar, Sintawati Lanjutan, dan Sintawati Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sintawati Pendidikan Dasar produknya berupa kartu Sintawati, dan program Sintawati Lanjutan produknya berupa surat keterangan dari UPTPK. Sintawati Dasar untuk tingkatan sekolah SD/MI dan SMP/MTS. Sedangkan Sintawati lanjutan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Sragen. Siswa yang memiliki kartu tersebut ketika mengikuti PPDB melakukan pendaftaran lewat jalur khusus yang disebut jalur Gakin (Keluarga Miskin). Kuota yang disediakan di setiap sekolah maksimal adalah 20% dari jumlah keseluruhan siswa yang diterima. Nilai juga berpengaruh terhadap seleksi penerimaan siswa baru. Batas minimal nilai harus diatas batas minimal KKM pendaftar jalur reguler. Jadi harapannya program ini juga dapat mencetak siswa yang berprestasi.

Sintawati Perguruan Tinggi Negeri dalam hal proses pendaftaran dan survey beda dengan Sintawati Dasar dan Sintawati Lanjutan. Proses survey lebih details tidak hanya menggunakan formulir indikator kemiskinan menurut BPS. Mahasiswa yang menjadi peserta beasiswa juga harus memiliki nilai yang baik karena dapat berpengaruh terhadap besarnya uang yang diterima. Jika nilainya tidak baik maka akan dapat pemotongan uang sesuai yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati No 25 tahun 2015. Proses

pencairan dana juga harus mengirimkan syarat-syarat seperti Kartu Hasil Studi (KHS) dan surat keterangan aktif kuliah dari kampus yang bersangkutan. Dana yang cair akan langsung dimasukkan ke rekening masing-masing peserta. Jika ada salah satu mahasiswa yang belum melengkapi syarat untuk pencairan dana maka akan berpengaruh terhadap peserta lain yaitu belum dicairkannya dana pendidikan.

#### **F. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Sintawati**

1. Pendanaan
2. Komitmen Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

#### **G. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Sintawati**

1. Sekolah tidak memberikan penjelasan alasan tidak diterimanya calon peserta penerima beasiswa.
2. Fasilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan yang tercantum di kartu Sintawati.
3. Dana pendidikan dasar tidak transparan.

### **KESIMPULAN**

Dari beberapa indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur efektivitas program dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan, program tersebut dinilai belum efektif karena ada beberapa indikator yang belum tercapai seperti sarana dan prasarana yang seharusnya didapatkan siswa tetapi pada kenyataannya tidak didapatkan. Masih ada siswa yang mengulang dan putus sekolah menunjukkan bahwa usaha mewujudkan pendidikan yang berkualitas belum tercapai sepenuhnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H. A. Rusdiana, M.M. 2015. *Kebijakan Pendidikan; dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Fattah, Prof. Dr. Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Gibson, dkk. 1991. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- H.A.R. Tilaar. 2008. *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalal, Dr. Fasli dan Supriadi, Prof. Dr. Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Sektor Publik*. Erlangga: Jakarta
- Rifai, Muhammad. 2011. *Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sutiyono. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Desa Seling Kecamatan Karang Sambung, Kabupaten Kebumen. 2009)
- Syarifuddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*. Jakarta: Grasindo